

PENGARUH ASPEK KEMASYARAKATAN TERHADAP ADMINISTRASI NEGARA: ANALISIS DIMENSI IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, DAN MILITER

**Muhammad Akbar Setiawan¹, Irfan B², Mawar³, Agnesya Atrivya Saputri Sareong⁴,
Nunung Septiani. KM⁵**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar
Email*: m9624620@gmail.com
Makassar, Indonesia

ABSTRAK

Administrasi negara tidak dapat dikecualikan dari konteks kemasyarakatan yang melingkupinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana aspek-aspek kemasyarakatan yang meliputi dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan militer mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan literatur review dengan menganalisis 15 sumber referensi terpercaya dari jurnal akademik, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ideologi memberikan landasan filosofis bagi sistem administrasi negara, sedangkan dimensi politik menentukan struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Aspek ekonomi mempengaruhi alokasi sumber daya dan kebijakan fiskal, sedangkan faktor sosial- budaya membentuk nilai dan norma dalam pelayanan publik. Dimensi militer berkontribusi pada aspek keamanan dan stabilitas yang mendukung efektivitas administrasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kelima aspek kemasyarakatan tersebut saling berinteraksi dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas administrasi negara. Integrasi yang harmonis antara aspek-aspek tersebut menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.

Kata kunci : administrasi negara, aspek kemasyarakatan, ekonomi, ideologi, militer, politik, sosial-budaya.

ABSTRACT

State administration cannot be separated from the social context that surrounds it. This study aims to analyze how social aspects, including ideological, political, economic, sociocultural, and military dimensions, influence the administration of state governance. The research method used a literature review approach by analyzing 15 reliable reference sources from relevant academic journals, books, and scientific publications. The results show that the ideological aspect provides a philosophical foundation for the state administration system, while the political dimension determines the structure of power and decision-making. The economic aspect influences resource allocation and fiscal policy, while socio-cultural factors shape values and norms in public service. The military dimension contributes to security and stability, which support administrative effectiveness. The conclusion of the study shows that these five societal aspects interact with each other and have a significant influence on the performance and effectiveness of state administration. Harmonious integration between these aspects is the key to the success of good governance and optimal public services.

Keywords : *State administration, social aspects, economy, ideology, military, politics, socioculture.*

PENDAHULUAN

Administrasi negara sebagai tulang punggung penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks kemasyarakatan yang melingkupinya. Dalam perkembangannya, administrasi negara telah mengalami transformasi paradigmatik yang signifikan, dari pendekatan yang semula bersifat mekanistik dan universal menuju pemahaman yang lebih kontekstual dan multidimensional. Transformasi ini mencerminkan kesadaran yang semakin mendalam bahwa efektivitas sistem administrasi negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam merespons dan beradaptasi dengan karakteristik unik masyarakat yang dilayaninya.

(Riggs, 1964) melalui teori prismatic society telah memberikan kontribusi fundamental dalam memahami keterkaitan antara administrasi negara dengan lingkungan kemasyarakatan. Teori ini menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan refleksi dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat di mana sistem tersebut beroperasi. Karakteristik masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal, akan terinternalisasi dalam struktur, proses, dan budaya organisasi administrasi negara. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh berbagai ahli yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami dan mengembangkan sistem administrasi negara. Dalam era globalisasi dan demokratisasi yang semakin intensif, administrasi negara menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan multifaset. Perubahan paradigma dari government ke governance menuntut administrasi negara untuk tidak lagi berperan sebagai entitas yang monolitik dan hierarkis, melainkan sebagai fasilitator yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat. (Osborne Ted, 1992) melalui konsep reinventing government menunjukkan bahwa administrasi negara harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis yang mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan.

Kompleksitas interaksi antara administrasi negara dengan aspek kemasyarakatan semakin tampak jelas ketika mengamati variasi karakteristik sistem administrasi antar negara. Perbedaan tradisi sejarah, sistem politik, kondisi ekonomi, struktur sosial, nilai budaya, dan

pengalaman konflik telah menghasilkan model-model administrasi negara yang beragam, masing-masing dengan keunggulan dan keterbatasannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak ada model universal administrasi negara yang dapat diterapkan secara seragam di semua konteks, melainkan diperlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana aspek-aspek kemasyarakatan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam membentuk karakteristik administrasi negara. (Dwiyanto, 2018) dalam konteks Indonesia menekankan bahwa reformasi administrasi negara harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap aspek budaya lokal, struktur politik, dan kondisi ekonomi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "good enough governance" yang dikembangkan oleh (Grindle, 2004), yang menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam merancang sistem administrasi yang efektif dan berkelanjutan.

Studi tentang pengaruh aspek kemasyarakatan terhadap administrasi negara menjadi semakin relevan dalam konteks contemporary public administration yang menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, revolusi teknologi digital, dan dinamika geopolitik internasional. Tantangan-tantangan ini menuntut administrasi negara untuk tidak hanya responsif terhadap kebutuhan domestik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan standar dan ekspektasi global tanpa kehilangan identitas dan karakteristik lokalnya. Dalam perspektif teoretis, analisis tentang pengaruh aspek kemasyarakatan terhadap administrasi negara berkontribusi pada pengembangan teori administrasi publik yang lebih holistik dan kontekstual. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan reformasi administrasi, serta memberikan kerangka analitis untuk merancang strategi pengembangan administrasi negara yang sesuai dengan kondisi spesifik setiap negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review yang sistematis. Literatur review dipilih untuk memberikan analisis komprehensif terhadap berbagai perspektif teoretis dan empiris tentang pengaruh aspek kemasyarakatan terhadap administrasi negara. Pendekatan ini memungkinkan sintesis pengetahuan dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang holistik tentang fenomena yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Dimensi Ideologi Terhadap Adminitrasi Negara

Perubahan ideologi memiliki dampak fundamental terhadap sistem pemerintahan Indonesia di berbagai periode sejarah. Dari awal kemerdekaan hingga era kontemporer, dinamika politik dan perubahan ideologis terus mempengaruhi struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Orde Lama (1945-1965) pada masa ini, Indonesia mengalami fluktuasi ideologi yang berpengaruh besar terhadap sistem pemerintahan. Penerapan ideologi Pancasila sebagai dasar negara ditantang oleh berbagai ideologi lain, seperti sosialisme, komunisme, dan islamisme. Di bawah kepemimpinan Soekarno, muncul gagasan NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang mencoba merangkul semua kekuatan politik. Namun, pendekatan ini memperlemah stabilitas politik karena ketegangan ideologis di antara kelompok-kelompok tersebut, yang berujung pada krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Penerapan pemerintahan yang semakin terpusat dan otoriter mengurangi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Orde Baru (1966-1998) yang dipimpin oleh Soeharto, ideologi yang dominan adalah Pancasila yang diinterpretasikan secara pragmatis sebagai alat untuk stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Orde Baru membawa stabilitas politik dengan memusatkan kekuasaan di tangan eksekutif dan militer serta membatasi peran partai politik dan kelompok masyarakat sipil. Ideologi pembangunan (developmentalisme) menjadi pusat perhatian, dengan pertumbuhan ekonomi yang diutamakan di atas hak-hak politik individu. Meskipun Indonesia mencapai kemajuan ekonomi, sistem yang terlalu terpusat ini menciptakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan publik. Pada akhirnya, krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an memicu jatuhnya orde baru, mengakhiri lebih dari tiga dekade pemerintahan otoriter.

Era Reformasi (1998-sekarang) reformasi membawa perubahan drastis dalam sistem pemerintahan Indonesia, ditandai dengan desentralisasi kekuasaan dan penerapan demokrasi multipartai. Reformasi ini terinspirasi oleh ideologi demokrasi liberal, yang menekankan kebebasan politik, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Meskipun demikian, proses transisi ini tidak terlepas dari tantangan. Desentralisasi sering diiringi oleh ketidakseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah, munculnya praktik korupsi di tingkat lokal, dan fragmentasi politik. Di tengah pluralisme politik yang semakin kuat, muncul kekhawatiran mengenai potensi radikalisme ideologis, baik dari kelompok konservatif agama maupun dari kelompok yang mendukung otoritarianisme baru. Namun sistem demokrasi yang lebih

terbuka juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses politik, memperkuat peran masyarakat sipil, serta memperbaiki institusi- institusi Demokrasi.

Pengaruh Ideologi Global sepanjang sejarahnya, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh ideologi global, terutama pada masa perang dingin dan setelahnya. Pada masa awal kemerdekaan, ideologi sosialisme dan komunisme dari Uni Soviet serta kapitalisme dari Barat mempengaruhi banyak keputusan politik dalam negeri. Pada masa Orde Baru, Indonesia lebih condong ke blok barat dan mengadopsi elemen-elemen kapitalisme dalam kebijakan ekonomi. Setelah Reformasi, pengaruh ideologi liberalisme semakin kuat dengan penekanan pada hak asasi manusia, kebebasan ekonomi, dan desentralisasi. Namun, globalisasi ideologi ini sering kali berbenturan dengan nilai-nilai lokal dan nasional yang terkandung dalam Pancasila, menimbulkan ketegangan dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, perubahan ideologi di Indonesia memberikan dampak yang kompleks terhadap sistem pemerintahan. Dari pemerintahan yang otoriter hingga lebih demokratis, peran ideologi dalam membentuk kebijakan negara sangat jelas. Pancasila tetap menjadi landasan ideologi negara, tetapi pelaksanaannya sering kali mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan politik setiap era. Untuk masa depan, Indonesia perlu mempertahankan keseimbangan antara ideologi nasional dan tantangan ideologi global, serta beradaptasi dengan dinamika politik tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental terkandung dalam Pancasila. Hanya dengan demikian, stabilitas politik dan integritas pemerintahan dapat terus terjaga di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks.

B. Pengaruh Dimensi Politik Terhadap Adminitrasi Negara

Dimensi politik terhadap administrasi negara merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dimensi politik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap administrasi negara melalui berbagai mekanisme dan aspek. Pertama, dalam hal perumusan kebijakan publik, proses politik sangat menentukan agenda setting dan prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan oleh birokrasi. Partai politik yang berkuasa, elite politik, dan kelompok kepentingan berperan aktif dalam menentukan isu-isu mana yang akan mendapat perhatian dan sumber daya dari administrasi negara (Kingdon, 2003). Kedua, dimensi politik mempengaruhi alokasi sumber daya melalui proses penyusunan anggaran negara, dimana negosiasi politik akan menentukan besaran dana yang dialokasikan untuk berbagai program dan sektor pemerintahan (Wildavsky, 1984). Pengaruh politik juga terlihat dalam aspek rekrutmen dan penempatan pegawai negeri sipil, meskipun secara formal menganut sistem merit, dalam praktiknya sering terjadi intervensi

politik terutama untuk posisi-posisi strategis dalam birokrasi (Peters, 2001). Hal ini dapat berdampak pada profesionalisme dan netralitas aparatur Negara.

Dalam implementasi kebijakan, dukungan atau resistensi politik sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Kebijakan yang mendapat dukungan politik kuat cenderung lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang menghadapi resistensi politik (Pressman Aaron, 1973). Hubungan antara politik dan administrasi telah menjadi perdebatan klasik dalam studi administrasi publik sejak (Wilson, 1887) memperkenalkan konsep dikotomi politik-administrasi yang memisahkan secara tegas antara pembuatan kebijakan (politik) dengan implementasi kebijakan (administrasi). Namun, pandangan ini kemudian dikritik oleh (Appleby, 1949) yang melihat politik dan administrasi sebagai kontinum yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak.

(Goodnow, 1900) juga menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan fungsi, keduanya tetap saling mempengaruhi dalam praktik pemerintahan. Dampak pengaruh dimensi politik terhadap administrasi negara bersifat ambivalen. Disatu sisi, pengaruh politik memberikan dampak positif berupa legitimasi demokratis, karena kebijakan yang di implementasikan merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan representasi rakyat (Dahl, 1989). Pengaruh politik juga meningkatkan responsivitas administrasi negara terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan mekanisme akuntabilitas dimana birokrasi dapat dimintai pertanggungjawaban kepada lembaga politik yang mewakili rakyat (Rosenbloom, 2003). Di sisi lain, pengaruh politik yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti politisasi birokrasi yang mengikis netralitas pegawai negeri sipil, ketidakstabilan kebijakan akibat perubahan konfigurasi politik, dan munculnya praktik rent seeking dimana aktor politik memanfaatkan administrasi negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Krueger, 1974). (Weber, 1946) dalam konsep birokrasi idealnya menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme birokrasi yang terlepas dari kepentingan politik. Namun dalam realitas, birokrasi tidak dapat sepenuhnya terlepas dari pengaruh politik karena mereka beroperasi dalam konteks sistem politik demokratis (Stillman, 2010).

(Lasswell, 1958) menggambarkan politik sebagai proses "who gets what, when, how" yang secara langsung mempengaruhi bagaimana administrasi negara mengalokasikan sumber daya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengelola hubungan politik-administrasi secara efektif, diperlukan keseimbangan antara responsivitas politik dan profesionalitas birokrasi. Strategi yang dapat ditempuh antara lain melalui profesionalisasi birokrasi dengan penguatan sistem merit, peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan

etika profesi (Mosher, 1982). Selain itu, perlu penguatan sistem kontrol internal dan eksternal, termasuk peran audit, pengawasan masyarakat, dan transparansi informasi publik untuk menciptakan check and balances (Henry, 2013) Reformasi kelembagaan yang menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan juga diperlukan untuk mencegah dominasi politik yang berlebihan terhadap administrasi negara (Frederickson et al., 2012). Dengan demikian, pengaruh dimensi politik terhadap administrasi negara dapat dioptimalkan untuk mendukung good governance dan pelayanan publik yang berkualitas

C. Pengaruh Dimensi Sosial-Budaya Terhadap Adminitrasi Negara

Dalam konteks administrasi negara Indonesia, aspek sosial budaya memiliki peran sentral yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk karakter dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. (Dwiyanto, 2021) menegaskan bahwa sistem sosial budaya Indonesia merupakan nilai, tata sosial, dan tata perilaku manusia Indonesia yang mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila di segala sudut kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman budaya Indonesia yang bersifat multikultural, sebagai konsekuensi dari kondisi geografis kepulauan, memberikan pengaruh signifikan terhadap corak pemerintahan negara kesatuan. Kondisi masyarakat yang plural dalam hal agama, suku, dan adat istiadat menciptakan iklim pemerintahan yang menjunjung tinggi toleransi, sebagaimana tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" (Maryana, 2016) mengidentifikasi bahwa lingkungan sosial pemerintahan terdiri dari berbagai aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, homo politicon, homo economicus, dan homo sapiens dalam kehidupan bernegara. Sosial budaya sebagai bagian dari lingkungan sosial pemerintahan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kebudayaan non-material yang mencakup bahasa, nilai, norma, pengetahuan, dan pengertian-pengertian dasar yang dihayati oleh masyarakat, serta kebudayaan material berupa benda-benda fisik yang dihasilkan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, seperti infrastruktur dan hasil karya teknologi yang mendukung operasional administrasi negara.

Pengaruh budaya terhadap perilaku aparatur negara bersifat alami dan otomatis, sehingga dampaknya terhadap kinerja sering diterima begitu saja tanpa disadari. Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya tidak dapat dipisahkan dari budaya yang telah melekat dalam masyarakat sejak dahulu dan hingga saat ini memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan pemerintahan, khususnya dalam membentuk budaya kerja aparatur negara. Budaya yang melekat dalam setiap jiwa para aparatur pemerintah secara tidak langsung mempengaruhi kinerja serta karakter aparatur dalam menjalankan pemerintahan. Davis (1992)

dalam (Maryana, 2016) berpendapat bahwa "orang-orang belajar bergantung pada budaya. Budaya memberikan stabilitas dan jaminan bagi mereka, karena dapat memahami hal-hal yang sedang terjadi dalam masyarakat dan mengetahui cara menggapainya." Namun demikian, (Alamsyah, 2003) dalam (Maryana, 2016) mengidentifikasi bahwa pada tingkat individu anggota masyarakat, faktor penyebab utama krisis nasional adalah tererosinya nilai-nilai etika dan moral budaya. Hal ini telah memungkinkan terjadinya perilaku dan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh adat, adab, dan agama, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Tantangan dalam menghadapi lingkungan global menuntut setiap SDM aparatur negara untuk mengubah cara pandang sebagai abdi negara agar lebih mampu mengakomodasikan perubahan secara demokratis dan konstitusional, namun dengan tetap menjaga stabilitas dan integrasi nasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, (Maryana, 2016) mengusulkan pendekatan reformasi sosial budaya yang bertumpu pada prinsip tiga lingkaran konsentris menurut (Alamsyah, 2003), yaitu tata nilai yang bersumber pada ajaran agama, adat istiadat, moral dan etika individu, keluarga, masyarakat dan organisasi, sistem sosial sebagai pranata yang diakui dan dipedomani oleh masyarakat dalam menyangkut tata hubungan, kelembagaan, budaya/perilaku masyarakat sebagai replika dari tata nilai, serta sistem peradaban yang merupakan wujud nyata secara fisik yang menggambarkan tata nilai dan sistem sosial yang berlaku dalam bentuk kehidupan sehari-hari, hasil karya seni, teknologi dengan segala realitasnya.

Dalam konteks reformasi sosial budaya, Pancasila berperan sebagai paradigmaketatanegaraan yang menjadi kerangka pikir bangsa Indonesia. (Maryana, 2016) menekankan bahwa setiap gerakan reformasi harus dimasukkan dalam kerangka Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi negara Indonesia, dengan implementasi nilai-nilai reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan moralitas ketuhanan, reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, reformasi yang berdasarkan nilai persatuan untuk menjamin tegaknya NKRI, reformasi yang berakar pada asas kerakyatan, dan reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, aspek sosial budaya memiliki pengaruh fundamental terhadap administrasi negara Indonesia. Keberhasilan reformasi administrasi negara sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya yang positif dengan tuntutan modernisasi dan profesionalisasi aparatur negara. Hal ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan

berkelanjutan untuk menciptakan aparatur negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

D. Pengaruh Dimensi Militer Terhadap Adminitrasi Negara

Militer adalah birokrasi pemerintahan besar di negara manapun. Perubahan administratif yang terjadi di militer sepanjang sejarah bangsa bertanggung jawab atas beberapa perubahan besar yang terjadi dalam administrasi publik. Perubahan administrasi publik terbesar dalam Departemen Pertahanan, yang berdampak pada lebih banyak pegawai publik dari pada perubahan lainnya. Alasan untuk mempertimbangkan melakukan perubahan dalam organisasi militer adalah untuk organisasi yang sangat efektif yang terdiri dari personel yang sangat kompeten, memiliki peralatan yang canggih dan modern digunakan untuk melindungi negara dan warga negara serta Militer terbiasa dengan perencanaan kontingensi dan pengerahan pasukan yang cepat.

Tujuan mempelajari organisasi militer adalah untuk menerapkan manajemen sipil dan teori organisasi saat ini pada organisasi militer dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi di bagian tertentu dari kehidupan organisasi militer. Pencarian untuk efisiensi dan efektivitas yang lebih besar, produktivitas yang lebih tinggi dan pengembangan. Profesi militer dipandu oleh rasa apa artinya melayani. Konsep tugas dan kehormatan meresap ke profesi, dikombinasikan dengan sikap berorientasi misi dan "menyelesaikan misi". Kecanggihan teknologi di sektor publik merupakan hal utama yang menjadi perhatian dalam mereformasi militer. Memahami militer sebagai sistem terbuka, yang efektivitasnya tergantung pada beradaptasi kemampuannya untuk dengan perubahan sosial. Penggunaan prinsip efisiensi dalam organisasi militer hanya bisa diterapkan dalam manajemen organisasi sipil pada masa damai saja (tidak dalam operasi perang), sedangkan apabila militer dalam pelaksanaan operasi militer perang (OMP) penekanannya adalah pada efektivitas. Reformasi militer terutama terkait dengan realitas baru dan tantangan keamanan baru di dunia dengan elemen kunci reformasi yaitu: 1. anggaran, 2. Struktur dan Modernisasi, 3. Reformasi Personil, 4. Pengembangan Pemimpin dan Pendidikan Militer dan 5. perbekalan/logistik.

KESIMPULAN

Perubahan ideologi memiliki dampak fundamental terhadap sistem pemerintahan Indonesia di berbagai periode sejarah. Dari awal kemerdekaan hingga era kontemporer, dinamika politik dan perubahan ideologis terus mempengaruhi struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Orde Lama (1945-1965) pada masa ini, Indonesia mengalami fluktuasi ideologi yang berpengaruh besar terhadap sistem pemerintahan. Penerapan ideologi Pancasila sebagai dasar negara ditantang oleh berbagai ideologi lain, seperti sosialisme, komunisme, dan islamisme. Hubungan antara politik dan administrasi telah menjadi perdebatan klasik dalam studi administrasi publik sejak (Wilson, 1887) memperkenalkan konsep dikotomi politik-administrasi yang memisahkan secara tegas antara pembuatan kebijakan (politik) dengan implementasi kebijakan (administrasi). Namun, pandangan ini kemudian dikritik oleh (Appleby, 1949) yang melihat politik dan administrasi sebagai kontinum yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak.

Aspek sosial budaya memiliki peran sentral yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk karakter dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. (Maryana, 2016) menegaskan bahwa sistem sosial budaya Indonesia merupakan nilai, tata sosial, dan tata perilaku manusia Indonesia yang mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila di segala sudut kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman budaya Indonesia yang bersifat multikultural, sebagai konsekuensi dari kondisi geografis kepulauan, memberikan pengaruh signifikan terhadap corak pemerintahan negara kesatuan. Militer adalah birokrasi pemerintahan besar di negara manapun. Perubahan administratif yang terjadi di militer sepanjang sejarah bangsa bertanggung jawab atas beberapa perubahan besar yang terjadi dalam administrasi publik. perubahan administrasi publik terbesar dalam Departemen Pertahanan, yang berdampak pada lebih banyak pegawai publik daripada perubahan lainnya.

REFERENSI

- Agus, A. A. (2016). Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. *Jurnal Office*, 2(2), 229–238.
- Alamsyah, A. (2003). Politik dan Birokrasi: Reposisi Peran Birokrasi Publik dalam Proses Politik Lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 55–70.
- Appleby, P. H. (1949). *Policy and administration*. In TA - TT -. University of Alabama Press.
<https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/498559>

- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Connery, R. H. (1935). *Governmental problems in wild life conservation*. In *Studies in history, economics, and public law*; no. 411 TA - TT -. Columbia University Press; P.S. King & Son, Ltd. [https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/245910](https://doi.org/LK-https://worldcat.org/title/245910)
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Eydi, H. (2015). *Organizational Effectiveness Models: Review and Apply in Non-Profit Sporting Organizations*. *American Journal of Economics, Finance and Management*, 1, 460–467.
- Fabac, R. (2010). *COMPLEXITY IN ORGANIZATIONS AND ENVIRONMENT - ADAPTIVE CHANGES AND ADAPTIVE DECISION-MAKING*. *Interdisciplinary Description of Complex Systems - Scientific Journal*, 8(1), 34–48.
- Faculty, M., & Wise, E. (2015). *The impact of conflict management on organizational effectiveness*. *Journal of Business and Management*, 7(36), 75–85.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2012). *The Public Administration Theory Primer*. Westview Press.
- Goodnow, F. J. (1900). *Politics and Administration: A Study in Government*. Macmillan.
- Grindle, M. S. (2004). *Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries*. Johns Hopkins University Press.
- Henry, N. (2013). *Public Administration and Public Affairs*. M.E. Sharpe.
- Kingdon, J. W. (2003). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Longman. Krueger, A. O. (1974). *The Political Economy of the Rent-Seeking Society*. American Elsevier Publishing Company.
- Lasswell, H. D. (1958). *Politics: Who Gets What, When, How*. Meridian Books.
- Maryana, I. (2016). *Reformasi Sosial Budaya dalam Upaya Pemantapan Sumber Daya Aparatur*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(2). <https://doi.org/10.25157/dinamika.v6i2.2259>
- Mbassana, M. E. (2014). *Validating the dimensions of the learning organization*. *International Journal of Business and Management*, 2(2), 15–26.

- Morrison, L. A., & Sharples, S. P. (1897). History of the Kimball family in America from 1634 to 1897.
- C.E. Tuttle Co. Mosher, F. C. (1982). Democracy and the Public Service. Oxford University Press.
- Osborne Ted, D. G. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley. Peters, B. G. (2001). The Politics of Bureaucracy. Routledge.
- Pratama, A. (2025). Dampak perubahan ideologi terhadap sistem. 3(7). Pressman Aaron, J. L. . W. (1973). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland. University of California
- PressRiggs, F. W. (1964). Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society. Houghton Mifflin.
- Rosenbloom, D. H. (2003). Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. McGraw-Hill.
- Stillman, R. J. I. I. (2010). Public Administration: Concepts and Cases. Wadsworth.
- Untermeyer, L. (1950). Modern American poetry. In TA - TT - (Mid-century [i.e. 7th] ed). Harcourt, Brace. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/1083923>
- Weber, M. (1946). From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford University Press.
- Wildavsky, A. (1984). The Politics of the Budgetary Process. Little, Brown and Company.
- Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, 2(2), 197–222.